

## **EFEKTIVITAS KINERJA PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PERMUKIMAN (STUDI KASUS: PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS KELURAHAN KARANGWARU KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA)**

Yanuar Kusuma Wardani<sup>1</sup>, Yori Herwangi<sup>2</sup>, Ahmad Sarwadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Gadjah Mada, [yanuarkusumaw@gmail.com](mailto:yanuarkusumaw@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Gadjah Mada, [yherwangi@ugm.ac.id](mailto:yherwangi@ugm.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Gadjah Mada, [sarwadi@ugm.ac.id](mailto:sarwadi@ugm.ac.id)

### **Abstrak**

Perkembangan permukiman kumuh perkotaan terjadi akibat kurangnya akses layanan sarana dan prasarana lingkungan. Bentuk peran pemerintah dalam pemberantasan permukiman kumuh ialah dengan mencanangkan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang melibatkan pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat. Program PLPBK ditekankan kepada perubahan perilaku masyarakat dalam menciptakan lingkungan hunian yang layak huni dengan pembangunan fisik sebagai media belajar masyarakat dalam memecahkan permasalahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas Program PLPBK berdasarkan kinerja *output*, *outcome*, dan *impact*. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan deduktif dan metode analisis kuantitatif dengan alat analisis statistik deskriptif. Konsep evaluasi dari efektivitas program PLPBK menggunakan konsep evaluasi sumatif. Data penelitian yang digunakan berasal dari observasi lapangan, kuesioner, dan wawancara terhadap informan (tokoh kunci) yang mengetahui pelaksanaan program PLPBK. Unit amatan penelitian yaitu pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta dengan unit analisisnya pelaku dalam program PLPBK Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta. Sampel responden yang digunakan dalam penelitian sejumlah 96 KK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas kinerja Program PLPBK Kelurahan Karangwaru sudah efektif. Semua kinerja mencakup kinerja *output*, kinerja *outcome*, maupun kinerja *impact* sudah efektif. Kinerja yang telah efektif menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran dari Program PLPBK di Kelurahan Karangwaru sudah tercapai.

**Kata Kunci: Efektivitas, Evaluasi, Kinerja, Program PLPBK**

### **Abstract**

*The development of urban slums is caused by lack of access to environmental facilities and infrastructure. The form of government's role in eradicating slum settlement is by launching Community Based Settlement Planning Program (PLPBK) which involves government, institute, and society. PLPBK program is emphasized to the changing of society behavior in creating living environment which is habitable with physical development as medium of community learning in solving environmental problem. This study aims to measure the effectiveness of PLPBK Program based on output, outcome, and impact performance. The research approach used is deductive approach and quantitative analysis method with descriptive statistical analysis tool. The evaluation concept of the effectiveness of the PLPBK program uses the concept of summative evaluation. The research data used comes from field observation, questionnaire, and interview to informant (key figure) who know the implementation of PLPBK program. Observation unit of research is the implementation of PLPBK program in Karangwaru Village Yogyakarta City with its unit of analysis of the perpetrators in the program PLPBK Kelurahan Karangwaru Yogyakarta. The sample of respondents used in the research was 96 households. The results showed that the overall effectiveness of the program performance of Karangwaru Village PLPBK has been*

*effective. All performance includes output performance, outcome performance, and impact performance is effective. Performance that has been effective shows that the goals and objectives of the Program PLPBK in Karangwaru Village has been achieved.*

**Keywords:** *Effectiveness, Evaluation, Performance, PLPBK Program*

## PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering ditemui di lingkungan perkotaan ialah munculnya kantong-kantong permukiman kumuh. Kecenderungan lokasi permukiman kumuh berada di bantaran sungai, pinggir rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan, dan pasar (BPS Provinsi D.I.Y, 2013). Salah satu instansi pemerintah yang berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Salah satu program yang dicanangkan ialah PNPM Mandiri Perkotaan dengan intervensi Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK). Tujuan dari Program PLPBK yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, dan lestari (Departemen PU, 2010). Tentunya program yang digagas pemerintah ini dilakukan dengan upaya membangun partisipasi masyarakat melalui kelembagaan sehingga masyarakat menjadi peka terhadap lingkungan yang mereka huni. Sinergi pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat akan mendorong keberlanjutan program peningkatan kualitas lingkungan. Beberapa prinsip yang dicanangkan meliputi solidaritas, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kesepakatan aturan main, kreatif, inovatif, mengutamakan membangun kapasitas lokal, mengutamakan kemitraan dan kolaborasi, dan menggunakan sumberdaya eksternal secara arif.

Kota Yogyakarta merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk yang relatif pesat sehingga dikategorikan sebagai kawasan cepat tumbuh (Bappeda Kota Yogyakarta, 2010). Hal tersebut tentunya menyebabkan tumbuhnya kantong-kantong permukiman kumuh di Kota Yogyakarta. Salah satu kawasan yang memiliki lingkungan kumuh di Kota Yogyakarta ialah Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo. Kelurahan Karangwaru merupakan kawasan prioritas yang mendapatkan Program PLPBK di Kota Yogyakarta pada Tahun 2009 karena memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah mandiri. Program ini memiliki Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) dengan rencana menengah 5 tahunan yaitu dari tahun 2010-2015. Banyaknya program penanganan lingkungan permukiman kumuh dengan basis masyarakat yang tidak berhasil seperti yang disebutkan oleh Hutagalung & Argo:

*“Peran serta masyarakat dalam manajemen kota bukan sarana yang mudah dilaksanakan. Masih adanya program penanganan permukiman kumuh yang masyarakatnya tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap program tersebut dan pada akhirnya membuat program tersebut sia-sia. Selain itu, komitmen dari berbagai aktor pelaku turut mempengaruhi keberhasilan program. Pada dasarnya partisipasi masyarakat terutama oleh masyarakat miskin menjadi tantangan utama dalam setiap implementasi program-program perbaikan permukiman kumuh baik oleh pemerintah, LSM, maupun oleh masyarakat sendiri” (Hutagalung & Argo, 2012).*

Berdasarkan uraian tersebut maka sangat penting dilakukan pengukuran terhadap efektivitas kinerja *output*, *outcome*, dan *impact* dari Program PLPBK Kelurahan Karangwaru sehingga mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran program tersebut. Keberhasilan pencapaian tujuan dalam program dilakukan menggunakan efektivitas karena efektivitas memiliki pengertian yaitu jawaban dari pertanyaan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai dari suatu program kebijakan (Dunn, 2000). Sehingga penting untuk mengetahui pencapaian tujuan dari program.

Latar belakang tersebut memunculkan pertanyaan “Sejauh mana efektivitas kinerja *output*, *outcome*, dan *impact* program PLPBK Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta”? Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian efektivitas program PLPBK Kelurahan Karangwaru dalam hal kinerja. Penelitian ini menarik dilakukan dikarenakan untuk membuktikan bahwa perencanaan yang dibuat dengan pelibatan pemerintah, BKM, dan masyarakat akan teraplikasikan sesuai tujuan dengan tujuan program.

## **METODOLOGI**

Metodologi penelitian diterangkan melalui rancangan penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis, dan variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK) Kelurahan Karangwaru.

### **Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian ini yaitu melakukan evaluasi dalam bentuk efektivitas kinerja. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deduktif. Pendekatan ini memiliki kerangka yang berasal dari perkiraan atau pemikiran tertentu ke arah data yang akan diterangkan (Sugiyono, 2014). Pendekatan ini dilakukan karena peneliti telah melakukan kajian mendalam terhadap teori-teori terkait efektivitas yang akan dibuktikan di lapangan. Konsep evaluasi yang dilakukan ialah evaluasi sumatif karena evaluasi dilakukan setelah program berakhir guna memberikan informasi terkait manfaat atau kegunaan program (Tayibnapi, 2008). Hal tersebut juga didukung dengan tahap evaluasi pasca pelaksanaan (*ex-post*). Menurut Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor, evaluasi pasca pelaksanaan dilakukan setelah pelaksanaan rencana berakhir dan untuk mereview pencapaian (keluaran/hasil/dampak) untuk mengatasi masalah yang ingin dicapai.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang diolah pada penelitian ini berasal dari data primer maupun sekunder. Data primer yang digunakan merupakan hasil kuesioner yang diberikan kepada masyarakat, wawancara tokoh kunci, dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi/lembaga terkait Program PLPBK Kelurahan Karangwaru. Teknik pengambilan sampling yang digunakan ialah *probability sampling* dengan *proportionate stratified random sampling* dengan sampel yang

dipilih ialah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Karangwaru dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin.

**Tabel 1. Jumlah Responden Masyarakat**

No.	Rukun Kampung (RK)	Jumlah KK	Persentase (%)	Sampel KK
1.	Karangwaru Lor	593	27	26
2.	Blunyahrejo	828	37	36
3.	Petinggen	205	9	9
4.	Bangirejo	421	19	18
5.	Karangwaru Kidul	166	8	7
Total		2.213	100	96

Sumber: Data Diolah dari RPLP Kelurahan Karangwaru, 2010

### Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif. Analisis kuantitatif didasarkan pada penilaian responden (masyarakat Kelurahan Karangwaru) terhadap indikator amatan yang telah ditentukan. Kegunaan dari metode analisis kuantitatif yaitu mengetahui persepsi dan pendapat terkait pencapaian tingkat efektivitas kinerja *output*, *outcome*, dan *impact* program. Penilaian persepsi dilakukan dengan menggunakan skala *likert* dengan menggunakan 4 tingkat alternatif jawaban yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), setuju (3), sangat setuju (4). Hasil penilaian tersebut akan ditransformasikan dalam penilaian efektivitas yang didasarkan pada jumlah skor maksimal dan minimal dari kuesioner sehingga didapat 4 pembagian interval kelas untuk masing-masing indikator amatan yaitu:

**Tabel 2. Interval Penilaian Efektivitas Kinerja**

Keterangan	Interval Nilai
Sangat tidak efektif	96 – 167
Tidak efektif	168 – 239
Efektif	240 – 311
Sangat efektif	312 – 384

Sumber: Hasil Analisa, 2017

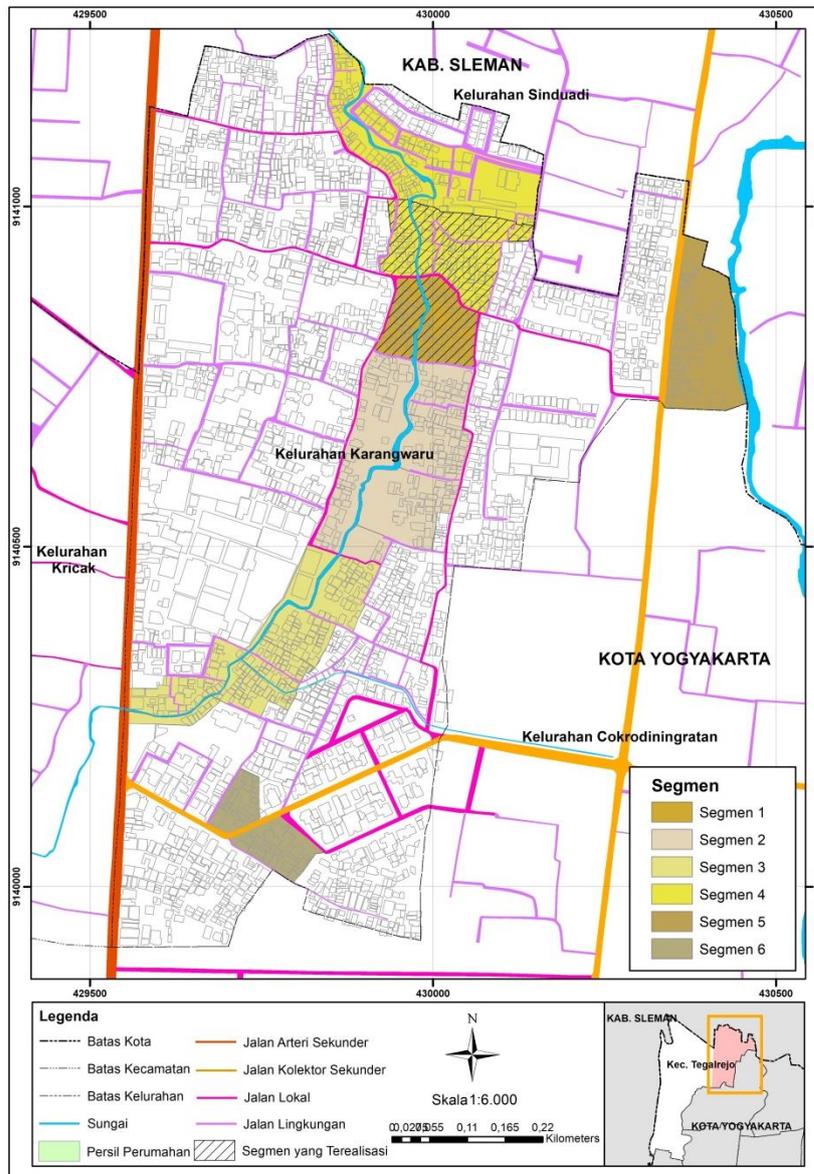
### Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Variabel yang digunakan untuk penilaian efektivitas terkait dengan kinerja *output* meliputi dokumen perencanaan partisipatif, pembangunan fisik kawasan prioritas, aturan bersama, dan unit pengelola SEL; kinerja *outcome* meliputi keteraturan masyarakat, peningkatan partisipasi; peningkatan kondisi permukiman dan pelayanan publik; dan kinerja *impact* memiliki variabel kualitas lingkungan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Kawasan dan Program PLPBK Kelurahan Karangwaru**

Kawasan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Kelurahan Karangwaru merupakan kelurahan pertama yang mendapatkan program PLPBK di Kota Yogyakarta. Kelurahan Karangwaru mendapatkan program ini pada tahun 2009 dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2010. Isi Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kelurahan Karangwaru berisi rencana jangka menengah yaitu tahun 2010-2015. Program ini terdiri dari 4 tahap yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan partisipatif, tahap pemasaran hasil perencanaan partisipatif, dan tahap pelaksanaan pembangunan. Kawasan prioritas dalam RTPLP terdiri dari 4 segmen berada pada bantaran Sungai Buntung dan Sungai Code (segmen 1, 2, 3, dan 4) sedangkan 2 sisanya berada di luar kawasan bantaran sungai (segmen 5 dan 6). Kondisi lingkungan di Kelurahan Karangwaru setelah adanya program ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, lingkungan permukiman yang telah dibenahi dari swakelola ialah 2 segmen yaitu segmen 1 dan segmen 4 (30%) dari total 6 segmen yang menjadi prioritas. Pelaksanaan perbaikan kondisi fisik lingkungan dengan swakelola Kelurahan Karangwaru tahap pertama (segmen 1) dilakukan pada tahun 2010-2012 dan tahap kedua (segmen 4) dilakukan pada tahun 2013-2014. Segmen lainnya menggunakan sistem *chanelling*.



**Gambar 1. Peta Segmen Realisasi Program PLPBK Karangwaru**  
 Sumber: Data Diolah, 2017

**Tabel 3. Kegiatan Perbaikan Fisik Lingkungan Kelurahan Karangwaru**

Segmen	Segmen 1	Segmen 4
Kegiatan Fisik lingkungan	Penggalian tanah cadas, pembuatan talud, <i>manteling</i> dan perkuatan bronjong, <i>ground seel</i> , siklop, pembuatan saluran air hujan, pembuatan pagar sisi dalam dan luar, pembuatan pot tanaman, pembuatan jalan inspeksi, pekerjaan beton kontruksi, tangga, elektrik, pekerjaan persiapan, pembuatan pagar besi dan pagar dinding, taman, <i>septic tank</i> komunal, jembatan, lampu jalan, <i>entrance</i> , <i>shelter</i> , pergola.	Pekerjaan persiapan, jalan setapak, talud, <i>ground seel</i> , pekerjaan pasangan dan plesteran, pekerjaan beton, pekerjaan arsitektur (penutup lantai, <i>shelter</i> bambu, <i>finishing</i> pemasangan batu, pemagaran).

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sungai Buntung KSM Waru Kasih 1-5, 2012-2014

Hasil dari pembangunan fisik lingkungan melalui program PLPBK menyebabkan kondisi bantaran sungai terlihat lestari. Adanya perbaikan terkait penataan sungai, jembatan, akses jalan, ruang terbuka, dan vegetasi membuat lingkungan permukiman lebih layak huni. Penataan sungai yang telah dilaksanakan menyebabkan masyarakat merasa aman terhadap bencana banjir dan longsor karena konstruksi yang telah dibuat kokoh dan mampu menahan arus Sungai Buntung. Rumah-rumah yang berpapasan langsung dengan sungai akhirnya memiliki akses jalan penghubung sepanjang sungai. Pembangunan jembatan digunakan untuk menghubungkan permukiman di bagian sisi kanan-kiri sungai. Pembangunan ruang terbuka publik berupa tempat bermain dan taman digunakan sebagai interaksi sosial masyarakat di Kelurahan Karangwaru.

### **Hasil Penelitian**

#### **Data Penelitian**

Data penelitian didapat dari kuesioner yang dihitung menggunakan statistik deskriptif sehingga mendapat penilaian persepsi masyarakat Kelurahan Karangwaru terkait pelaksanaan program PLPBK. Hasil penelitian didasarkan pada variabel yang telah ditentukan sebelumnya melalui studi mendalam. Efektivitas kinerja Program PLPBK Kelurahan Karangwaru dinilai menggunakan kinerja *output* yang merupakan keluaran dari program, kinerja *outcome* yang merupakan hasil dari program, dan kinerja *impact* yang merupakan dampak dari program. Penilaian efektivitas dari Program PLPBK Kelurahan Karangwaru ditampilkan pada tabel 4.

**Tabel 4. Penilaian Efektivitas Program PLPBK Kelurahan Karangwaru**

Kinerja	Variabel	Indikator	Indikator Amatan	Skor	Penilaian	
<i>Output</i>	Dokumen perencanaan partisipatif	Keterbentukan RPLP dan RTPLP	Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan RPLP dan RTPLP	268	Efektif	
			Terakomodirnya kebutuhan masyarakat dalam RPLP dan RTPLP	288	Efektif	
	Unit pengelola SEL	Kapasitas unit pengelola SEL	Kemampuan unit pengelola SEL melayani masyarakat	294	Efektif	
	Aturan bersama	Kesepakatan aturan bersama	Aturan bersama di buat dan disepakati oleh semua masyarakat dan pemerintah	285	Efektif	
			Aturan bersama menjadi kontrol perilaku dalam penataan lingkungan permukiman	276	Efektif	
	Pembangunan fisik kawasan prioritas	Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana kawasan prioritas	Pelibatan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana	276	Efektif	
Kesesuaian pembangunan fisik dengan kebutuhan masyarakat			293	Efektif		
<b>Penilaian Kinerja Output</b>				<b>1.980</b>	<b>Efektif</b>	
<i>Outcome</i>	Keteraturan masyarakat	Keefektifan fungsi unit pengelola SEL (sosial, ekonomi, dan lingkungan)	Keberfungsian UPK, UPL, dan UPS dalam program PLPBK	291	Efektif	
			Kerjasama pemerintah kelurahan dan BKM	Keterjalinan kerjasama antara pemerintah kelurahan dan BKM	328	Sangat efektif
			Kesadaran terkait RPLP dan RTPLP	Pengaplikasian RTPLP dan RPLP dalam peningkatan kualitas lingkungan	301	Efektif
	Peningkatan partisipasi	Pertisipasi masyarakat miskin dan rentan dalam pengambilan keputusan	Keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan	259	Efektif	
			Pertisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	267	Efektif
			Partisipasi kelompok peduli dalam pertemuan dan pemasaran sosial	Keterlibatan kelompok peduli dalam pertemuan dan pemasaran sosial	302	Efektif
	Peningkatan kondisi permukiman dan pelayanan publik	Kondisi sarana prasarana	Kualitas sarana prasarana dari pelaksanaan pembangunan fisik	299	Efektif	
			Cakupan pelayanan sarana prasarana terbangun	288	Efektif	
			Sistem operasional dan pemeliharaan kegiatan fisik	Keberfungsian lembaga O dan P pembangunan kawasan yang telah dibentuk dan dispekati	221	Tidak efektif
			Kemanfaatan dana BLM	Keberfungsian sistem O dan P yang telah dispekati	228	Tidak efektif
<b>Penilaian Kinerja Outcome</b>				<b>3.089</b>	<b>Efektif</b>	
<i>Impact</i>	Kualitas lingkungan	Manfaat sarana prasarana	Sarana prasarana bermanfaat untuk masyarakat	301	Efektif	
		Akses lingkungan	Peningkatan akses lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari	321	Sangat efektif	
		Akses biaya	Pembangunan fisik dengan <i>community based</i> lebih terjangkau dari segi dana	285	Efektif	
		Keberlanjutan aturan bersama	Aturan bersama telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat sebagai kontrol	278	Efektif	
<b>Penilaian Kinerja Impact</b>				<b>1.185</b>	<b>Efektif</b>	
<b>Total Penilaian Kinerja Output, Outcome, dan Impact</b>				<b>6.254</b>	<b>Efektif</b>	

Sumber: Hasil Analisa, 2017

## **Hasil Analisis Data**

### **Kinerja Output**

Kinerja *output* dari Program PLPBK Kelurahan Karangwaru dinilai berdasarkan dokumen perencanaan partisipatif, pembangunan fisik kawasan prioritas, aturan bersama, dan unit pengelola SEL (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Berdasarkan penilaian kinerja *output* Program PLPBK Kelurahan Karangwaru sudah efektif. Dokumen perencanaan partisipatif merupakan hasil dari pemetaan swadaya masyarakat yang disusun menjadi Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). Penyusunan kedua dokumen tersebut telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dimulai dari tingkat RT, RW, dan Rukun Kampung. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memetakan potensi masalah yang mereka rasakan pada lingkungannya. Keterlibatan masyarakat dilakukan secara langsung melalui pertemuan setiap rukun kampung (Karangwaru Lor, Blunyahrejo, Bangirejo, Karangwaru Kidul, dan Petinggen) untuk menyepakati masalah yang mereka alami. Pelibatan ini akan sangat berguna dalam menentukan langkah terbaik pembangunan lingkungan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nantinya aspirasi tersebut akan di ranking berdasarkan prioritas dari yang terpenting hingga paling tidak penting. RPLP dan RTPLP Kelurahan Karangwaru dibentuk melalui perencanaan lingkungan makro dan perencanaan lingkungan mikro. Berdasarkan penilaian masyarakat, indikator keterlibatan masyarakat dan terakomodirnya kebutuhan masyarakat pada RPLP dan RTPLP sudah efektif. Masyarakat merasa sangat dilibatkan dalam menentukan cara untuk memperbaiki lingkungannya.

Unit pengelola SEL (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dalam kaitannya dengan Program PLPBK berfungsi untuk mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam program PLPBK. Sesuai dengan kompetensinya Unit Pengelola Sosial (UPS) berfungsi sebagai pusat pembangunan, pengembangan pelayanan sosial komunitas, dan kontrol sosial; Unit Pengelola Ekonomi (UPK) berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat, jaring produksi dan pemasaran serta pelayanan modal produksi; sedangkan Unit Pelayanan Lingkungan (UPL) berfungsi sebagai pusat etika pembangunan lingkungan, pengembangan pelayanan masyarakat dengan sarana permukiman. Di Kelurahan Karangwaru fungsi-fungsi tersebut sudah terimplementasikan dengan baik melalui program PLPBK karena bukan hanya sekedar melayani namun unit pengelola tersebut mendorong masyarakat untuk mampu terlibat secara penuh terhadap pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penilaian masyarakat, kemampuan unit pengelola SEL sudah efektif dalam melayani kebutuhan mereka dalam program PLPBK.

Aturan bersama merupakan kesepakatan antara masyarakat, lembaga masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan program PLPBK. Pada Program PLPBK Kelurahan Karangwaru masyarakat diikutsertakan dalam pembuatan aturan agar masyarakat memiliki rasa memiliki dan

berkomitmen dalam program PLPBK ini. Keikutsertaan dalam pembuatan ini dinilai sudah efektif karena masyarakat mau menentukan aturan yang akan mereka terapkan. Mereka juga sudah menganggap bahwa aturan bersama tersebut menjadi kontrol dalam melaksanakan dan menjaga aturan bersama sehingga dinilai efektif. Aturan bersama yang diterapkan di Kelurahan Karangwaru meliputi sarana prasarana, tata ruang dan lingkungan, bangunan, fasilitas publik, sosial budaya, dan ekonomi.

Pembangunan fisik kawasan prioritas merupakan tahapan terakhir dari serangkaian tahapan pelaksanaan program. Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan sampai tahun 2014 meliputi kegiatan fisik yang ada di Segmen 1 dan Segmen 4 (30%). Pelaksanaan pembangunan fisik ini merupakan tanggung jawab dari KSM. Berdasarkan observasi lapangan, pembangunan fisik yang telah terlaksana yaitu konstruksi bangunan sungai, jalan inspeksi, jembatan, ruang terbuka publik, dan penataan vegetasi. Program PLPBK di Kelurahan Karangwaru sepenuhnya melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Sistem dari program ini merupakan swadaya sehingga masyarakat yang mau dan mampu untuk ikut dalam pembangunan sangat diterima keikutsertaannya. Pelibatan masyarakat sudah efektif karena sepenuhnya masyarakat dilibatkan. Dalam pembangunannya pun juga disesuaikan dengan RPLP dan RTPLP yang telah disepakati oleh masyarakat sendiri sehingga pembangunan sudah pasti efektif dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat.

### **Kinerja Outcome**

Kinerja *outcome* memperhatikan beberapa variabel penting yang terdiri dari keteraturan masyarakat, peningkatan partisipasi, serta peningkatan kondisi permukiman dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian, secara umum kinerja *outcome* Program PLPBK Kelurahan Karangwaru sudah efektif. Keteraturan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangwaru dalam program PLPBK dilihat dari keberfungsian unit pengelola SEL. Seperti yang telah dijelaskan pada kinerja *output* terkait dengan fungsi unit pengelola SEL, masyarakat menilai bahwa unit pengelola SEL di Kelurahan Karangwaru telah efektif. Selain itu, keterjalanan kerjasama antara pemerintah kelurahan dan BKM Tridaya Waru Mandiri merupakan kunci sukses agar Program PLPBK ini berjalan efektif. Kedua lembaga tersebut bekerjasama untuk mendorong dan mendampingi masyarakat sejak proses persiapan sehingga masyarakat menilai bahwa kedua lembaga tersebut efektif dalam menjalin kerjasama. Hasil dari Program PLPBK Kelurahan Karangwaru juga terkait dengan pengaplikasian RPLP dan RTPLP dalam keseharian. Masyarakat Kelurahan Karangwaru sudah mengaplikasikan secara penuh sesuai dengan isi dari dokumen tersebut sehingga dapat dikatakan efektif berdasarkan penilaian.

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam Program PLPBK. Keikutsertaan masyarakat dalam program PLPBK merupakan modal utama dalam keberhasilan program ini. Berdasarkan penilaian dari responden dapat dikatakan

bahwa partisipasi masyarakat miskin, rentan, dan perempuan sudah efektif dalam program ini. Dalam program PLPBK Kelurahan Karangwaru masyarakat miskin, rentan, dan perempuan diberikan penguatan agar masyarakat tersebut ikut serta dalam pelaksanaan program. Antusias dan komitmen masyarakat sudah sangat baik dengan memberikan ide-ide terhadap setiap kebutuhan dari lingkungannya. Peran tersebutlah yang menyebabkan berkurangnya gap kebutuhan masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama dalam pembuatan keputusan. Kelompok peduli (relawan) merupakan masyarakat yang rela untuk ikut dalam segala bentuk kegiatan di dalam Program PLPBK. Di Kelurahan Karangwaru peran kelompok peduli (relawan) sudah efektif dalam pertemuan dan pemasaran. Para kelompok inilah secara sukarela mengorganisasikan masyarakat agar semua pelaksanaan program sesuai dengan rencana kerja. Selain itu, kelompok peduli juga membantu dalam pemasaran hasil rencana investasi masyarakat melalui *chanelling* terhadap instansi-instansi terkait.

Program PLPBK membantu menyediakan sarana prasarana agar kondisi permukimannya menjadi lebih baik dengan sistem komunitas. Program PLPBK Kelurahan Karangwaru sudah berhasil menyediakan sarana prasarana dengan kualitas baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari masih tersedianya dan terawatnya sarana prasarana tersebut sampai saat ini. Pemanfaatan sarana prasarana tersebut juga bisa dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Karangwaru secara luas. Sarana prasarana yang telah dibangun dapat digunakan oleh masyarakat secara umum tanpa membatasi lingkup wilayah sehingga cakupan pelayanan sarana prasarana telah memenuhi. Pada pedoman pelaksanaan PLPBK tahun 2010 disebutkan bahwa setiap pembangunan fisik harus memiliki sistem operasional dan pemeliharaan. Di Kelurahan Karangwaru sendiri pembentukan lembaga dan sistem O & P sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali namun lembaga dan sistemnya tidak berfungsi dan cenderung terhenti karena masyarakat tidak mau berperan secara penuh dalam lembaga tersebut. Menurut penilaian juga dapat dilihat bahwa fungsi lembaga dan sistem O & P tidak efektif. Selain itu yang terpenting ialah kemanfaatan dana BLM sebagai modal media belajar masyarakat dalam pembangunan fisik lingkungan. Pemanfaatan dana BLM di Kelurahan Karangwaru sudah efektif. Dana BLM tersebut dipergunakan secara penuh dan dipertanggung jawabkan melalui pembangunan dan pelaporan secara rinci. Kemanfaatan dana tersebut juga bisa dilihat secara real dengan terciptanya lingkungan yang layak huni.

### **Kinerja *Impact***

Kinerja *impact* ditentukan dengan terciptanya kualitas lingkungan. Hal tersebut didukung dengan manfaat dari sarana prasarana yang secara langsung dirasakan masyarakat Kelurahan Karangwaru. Sarana prasarana telah mengatasi masalah kekumuhan yang menyebabkan mereka terisolir. Pembangunan sarana prasarana sangat bermanfaat dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi mereka karena adanya akses jalan yang terbangun dapat melancarkan hubungan sosial, menciptakan peluang ekonomi lokal, dan juga perubahan perilaku masyarakat

dalam pemeliharaan lingkungan. Selain itu juga terjadi peningkatan akses lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari karena lingkungan mereka secara bertahap sudah berjalan menjadi lingkungan yang tidak kumuh. Untuk permasalahan akses biaya, dengan adanya program PLPBK ini memudahkan dalam pembangunan fisik sebab dana BLM sangat memberikan kontribusi besar untuk membantu swadaya warga dalam pembangunan fisik. Yang terpenting lagi keberlanjutan aturan bersama yang masih diterapkan masyarakat karangwaru terutama berkaitan dengan akses lingkungan. Masyarakat Kelurahan Karangwaru tetap menjaga, merawat, dan menggunakan sarana prasarana sesuai dengan aturan yang disepakati demi menjaga lingkungannya tetap bersih, sehat, dan lestari.

### **Pembahasan**

Efektivitas erat kaitannya dengan pencapaian tujuan program. Pada Program PLPBK, tujuan program bisa terwujud apabila terjalin kerjasama yang baik diantara pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan wewenang penuh dalam memperkenalkan kebijakan harus mendampingi masyarakat secara langsung. Peran pemerintah tersebut dibantu oleh lembaga yang berkembang di masyarakat sehingga peran selalu terhubung melalui kerjasama. Program PLPBK yang diterapkan berusaha untuk mengembangkan hal tersebut demi terciptanya pembangunan dan pemerintahan yang baik. Berdasarkan penilaian responden terhadap efektivitas, Program PLPBK Kelurahan Karangwaru sudah dapat dikatakan efektif. Dimulai dari pembentukan perencanaan partisipatif semua aspek masyarakat diikuti mulai dari lingkup RT baik dari masyarakat rentan, miskin, dan perempuan. Lembaga masyarakat yaitu BKM Tridaya Waru Mandiri juga memantau pelaksanaan dalam pembentukan RPLP dan RTPLP yang menjadi kunci rencana kebutuhan masyarakat Kelurahan Karangwaru. Aturan-aturan bersama juga ditetapkan bersama masyarakat agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap kesepakatan yang mereka punyai. Hal inilah yang menjadi tonggak kontrol sosial antar masyarakat. Selain hal tersebut, unit pengelola SEL (sosial, ekonomi, dan lingkungan) juga membantu mendampingi dan melayani kebutuhan masyarakat apabila kurang pemahaman terkait dengan program PLPBK. Pendampingan dari pemerintah dan lembaga masyarakat menyebabkan antusias yang begitu besar bagi masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan program. Pembangunan fisik yang melibatkan masyarakat juga akan meningkatkan rasa memiliki untuk selalu memelihara dan merawat keberlanjutannya. Peningkatan kondisi permukiman dan pelayanan publik yang meningkat dilihat dari kondisi sarana prasarana dan manfaatnya. Sarana prasarana yang terbangun memberikan kontribusi terhadap masyarakat karena akses penghubung telah memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan serta merupakan jalan masuk untuk jalur ekonomi masyarakat. Terlebih lagi adanya ruang terbuka dan penanaman vegetasi membuat lingkungan menjadi asri. Penataan lingkungan juga menyebabkan kerawanan bencana menjadi berkurang dan lingkungan menjadi bersih, sehat, dan lestari. Hal tersebut juga didukung oleh komitmen masyarakat yang kuat dalam menjaga keberlanjutan program yang telah mereka rencanakan, implementasikan, dan

pelihara. Di dalam Program PLPBK Kelurahan Karangwaru terdapat indikator yang belum memenuhi yaitu terealisasinya sistem operasional dan lembaga pengelolaan yang mengaturnya. Terhentinya sistem operasional dan pemeliharaan terjadi akibat tidak berfungsinya sistem fungsi lembaga dalam mengatur kegiatan dalam sistem operasional dan pemeliharaan. Namun pada realitanya walaupun tidak ada sistem tersebut masyarakat sekitar berusaha setiap hari mengelola dan memelihara keberlanjutan sarana prasarana tersebut. Pembelajaran yang dapat diambil dari penelitian ini ialah bahwa pembangunan yang berkelanjutan dengan pencapaian tujuan yang efektif dapat terwujud apabila terjalin kerjasama antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat dengan persamaan pandangan terhadap program.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK) Kelurahan Karangwaru secara umum sudah efektif sehingga tujuan program sudah tercapai. Kinerja *output* pada program PLPBK sudah efektif. Kinerja *outcome* secara keseluruhan dapat dikatakan sudah efektif dengan terdapat satu indikator amatan yang menunjukkan sangat efektif yaitu keterjalinan kerjasama antara pemerintah kelurahan dan BKM Tridaya Waru Mandiri dan dua indikator amatan yang menunjukkan tidak efektif yaitu keberfungsian lembaga dan sistem O & P yang telah dibentuk dan disepakati. Kinerja *impact* secara umum sudah efektif dengan terdapat satu indikator amatan yang sangat efektif yaitu peningkatan akses lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bappeda Kota Yogyakarta. (2010). *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) D.I. Yogyakarta 2010*. Yogyakarta: Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bappenas. (2009). *Pedoman Evaluasi Pembangunan Sektoral*. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- BKM Tridaya Waru Mandiri. (2010). *Dokumen RTPLP: Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman*. Yogyakarta: BKM Tridaya Waru Mandiri.
- BKM Tridaya Waru Mandiri. (2010). *Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta*. Kota Yogyakarta: BKM Tridaya Waru Mandiri.
- BKM Tridaya Waru Mandiri. (2012). *Laporan Pelaksanaan Pembangunan Normalisasi/Penataan Kali Buntung KSM Waru Kasih 2*. Yogyakarta: BKM Tridaya Waru Mandiri.
- BKM Tridaya Waru Mandiri. (2012). *Laporan Pelaksanaan Pembangunan Normalisasi/Penataan Kali Buntung KSM Waru Kasih 3*. Yogyakarta: BKM Tridaya Waru Mandiri.
- BKM Tridaya Waru Mandiri. (2012). *Laporan Pelaksanaan Pembangunan Normalisasi/Penataan Kali Buntung KSM Waru Kasih 1*. Yogyakarta: BKM Tridaya Waru Mandiri.

- BKM Tridaya Waru Mandiri. (2014). *Laporan Kegiatan Pembangunan Talud Segmen 4 Sungai Buntung KSM Waru Kasih 4 dan Waru Kasih 5*. Yogyakarta: BKM Tridaya Waru Mandiri.
- BPS Provinsi D.I.Y. (2013). *Statistik Lingkungan Hidup D.I. Yogyakarta 2012*. Yogyakarta: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Departemen PU. (2010). *Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Community Based Neighborhood Development): Pedoman Pelaksanaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Ciptakarya Departemen Pekerjaan Umum.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hutagalung, S., & Argo, T. A. (2012). Efektivitas Program Perbaikan Infrastruktur Lingkungan PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Studi Kasus: RW 15 Kelurahan Tamansari. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK VIN2* , 229-237.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Tayibnaps, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: RINEKA CIPTA.